



ANALISIS POS-POS DALAM PAJAK DAERAH YANG MEMPERNGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2010-2012

Belinda Christy Sutanto¹

Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Vivi Adeyani Tandean²

Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Untuk menjalankan otonomi daerah yang sepenuhnya maka diperlukan kemampuan masing-masing daerah untuk meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dimana kemandirian keuangan menjadi kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Pajak daerah yang dipungut disesuaikan dengan karakteristik dan potensi dari masing-masing daerah. Wilayah DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi, politik dan kebudayaan menyebabkan tingginya potensi pendapatan daerah yang dapat diterima melalui pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel. Kontribusi pajak dan tingkat efektivitas pajak yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah akan menunjukkan bahwa pajak yang bersangkutan memiliki potensi untuk lebih dioptimalkan lagi.

Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, serta pajak hotel. Metode penelitian yang digunakan adalah studi statistik dan menggunakan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rata-rata anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah lebih besar daripada pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat hunian hotel. Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel memiliki jumlah yang persentase rata-rata yang lebih besar daripada anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotelnya. Selain itu pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel juga memiliki kontribusi yang tergolong sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang baik. Pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel memiliki tingkat pertambahan yang baik. Selain itu pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel juga memiliki rata-rata tingkat efektivitas pajak yang positif, serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: PAD, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Efektifitas, Kontribusi

ABSTRACT

Regional autonomy is the right, authority, and responsibility to manage and administer own governmental matter. To run regional autonomy fully, it is essential that each district has the ability to minimise its dependence on the central government, where monetary independence becomes an important criterion to know the capability of a district to manage and administer its own area. Local tax is one of the components of own-source revenue which has the potential and considerable contribution towards revenue. Local tax which is collected is adapted with the characteristics and potentials from each district. The central place that Special Capital City District Jakarta holds as the economic, politic and cultural centre results in the high potential revenue contributed by the vehicle tax and hotel tax. The tax contribution and tax effectivity towards the own-source revenue will show that whether the related taxes have the potential to be more optimised.

The object of this research is the own-source revenue, vehicle tax, and hotel tax. The method of research used is statistical study, using descriptive research design. The data collection technique used in this research is by using secondary data collected from government institutions. The results of this research show that the total average of vehicle tax and hotel tax are greater than the increase in motor vehicle amount and hotel occupancy rate. Realisation of motor vehicle tax and hotel tax has a greater percentage average compared to the budget of motor vehicle tax and hotel tax. Additionally, vehicle tax and hotel tax also contribute considerably towards the own-source revenue.

The conclusion from this research is that the motor vehicle tax and hotel tax are good sources of local tax. Motor vehicle tax and hotel tax have a good rate of increase. Additionally, motor vehicle tax and hotel tax also have positive average of tax effectivity, and also give considerably large contributions towards own-source revenue.

Keywords: Own-source Revenue, Vehicle Tax, Hotel Tax, Effectivity, Contributions





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Sistem pemerintahan yang berorientasi kepada pusat telah menyebabkan adanya kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa oleh karena itu dilakukan perubahan dengan menjalankan otonomi daerah secara luas sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan adalah salah satu faktor utama keberhasilan realisasi otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Kemandirian keuangan menjadi kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan ditandai dengan semakin besarnya persentase nilai Pendapatan Asli Daerah dan semakin menurunnya persentase dukungan pusat dalam bentuk sumbangan / bantuan.

Sumber pendapatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Pajak Daerah, diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel. Kota Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, dapat dipastikan bahwa kendaraan bermotor banyak diperlukan dalam berbagai kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan. Jakarta juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit yang menyebabkan adanya pertumbuhan kebutuhan atas alat transportasi, sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi pendapatan yang potensial untuk dikembangkan.

Potensi pendapatan daerah yang lain juga terdapat pada pajak hotel. Globalisasi yang berdampak pada bertambahnya jumlah perusahaan yang menyebabkan bertambahnya kunjungan bisnis ke Jakarta. Selain itu beberapa obyek wisata unggulan di Jakarta seperti Ragunan, Monas, Ancol, maupun TMII juga salah satu faktor yang menarik minat pengunjung dari luar Jakarta. Semuanya berdampak pada bertambahnya kebutuhan akomodasi yang juga menambah pendapatan pemerintah daerah atas pajak hotel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pos-pos dalam Pajak Daerah yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2010-2012”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dan perkembangan pajak kendaraan bermotor serta pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, berapa besarnya peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apakah realisasi pendapatan telah sesuai dengan anggaran, serta apakah anggaran pajaknya telah sesuai dengan potensi yang ada?”

C. Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) serta pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, untuk mengetahui apakah realisasi pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui apakah penetapan anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah sesuai dengan potensi.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerimaan pendapatan daerah dan memberikan gambaran evaluasi yang lebih jelas kepada pengaruh pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah Sebagai bahan masukan untuk melihat pengaruh pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pembentukan anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta hambatan yang timbul dalam optimalisasi penerimaannya di wilayah DKI Jakarta.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah sumber-sumber pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah DKI Jakarta berupa pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder termasuk didalamnya yaitu data anggaran dan realisasi pajak dari pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel, serta data realisasi dari pendapatan asli daerah. Penulis juga menggunakan data-data berupa data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah tingkat hunian hotel per tahun di wilayah DKI Jakarta.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta. Dokumen yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta berupa data laporan pajak daerah berupa anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel serta realisasi pendapatan asli daerah. Dokumen berupa jumlah peningkatan kendaraan bermotor dan jumlah peningkatan tingkat hunian hotel juga merupakan data sekunder yang berasal dari hasil olahan Badan Pusat Statistik wilayah DKI Jakarta. Data-data yang dikumpulkan merupakan data untuk periode 2010-2012.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis adalah metode perbandingan tetap. Dalam Moleong (2013:288) metode perbandingan tetap adalah membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Data diolah dengan menghitung data yang berbentuk angka yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2012. Langkah-langkah pengelolaan data dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat tabel jumlah kendaraan bermotor dan tabel anggaran pajak kendaraan bermotor tahun 2009-2012.
2. Menyusun tabel tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_n = \left(\frac{A_n}{A(n-1)} \times 100\% \right) - 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

T = Tingkat pertambahan

A = Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah anggaran kendaraan bermotor

n = Tahun (periode) tertentu

3. Membuat tabel jumlah tingkat hunian hotel dan tabel anggaran pajak hotel tahun 2009-2012.
4. Menyusun tabel tingkat pertambahan jumlah tingkat hunian hotel dan tabel tingkat pertambahan anggaran pajak hotel, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_n = \left(\frac{B_n}{B(n-1)} \times 100\% \right) - 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

T = Tingkat pertambahan

B = Jumlah tingkat hunian hotel dan jumlah anggaran hotel

n = Tahun (periode) tertentu



5. Membuat tabel anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel serta realisasi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012.
6. Menyusun tabel analisis pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan pajak} = \frac{Y - X}{X} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

X = Anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel

Y = Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel

7. Menyusun tabel tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Keterangan	Kode
< 100%	Tidak Efektif	TE
= 100%	Efektif	E
> 100%	Sangat Efektif	SE

Sumber: Muhammad Fauzan, Jurnal Akuntansi, 2012:6

8. Menyusun tabel kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan kontribusi pajak hotel terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan rumus sebagai berikut:

$$Kn = \frac{An}{Bn} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap PAD

An = Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel tahun (periode) tertentu

Bn = Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun (periode) tertentu

Tabel 3.3
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Keterangan	Kode
> 4%	Sangat Berkontribusi	SB
3% - 3,9%	Berkontribusi	B
2% - 2,9%	Cukup Berkontribusi	CB
1% - 1,9%	Kurang Berkontribusi	KB
0% - 0,9%	Tidak Berkontribusi	TB

Sumber: Fuad Bawahir, Peran dan Strategi Keuangan di Daerah, 1999

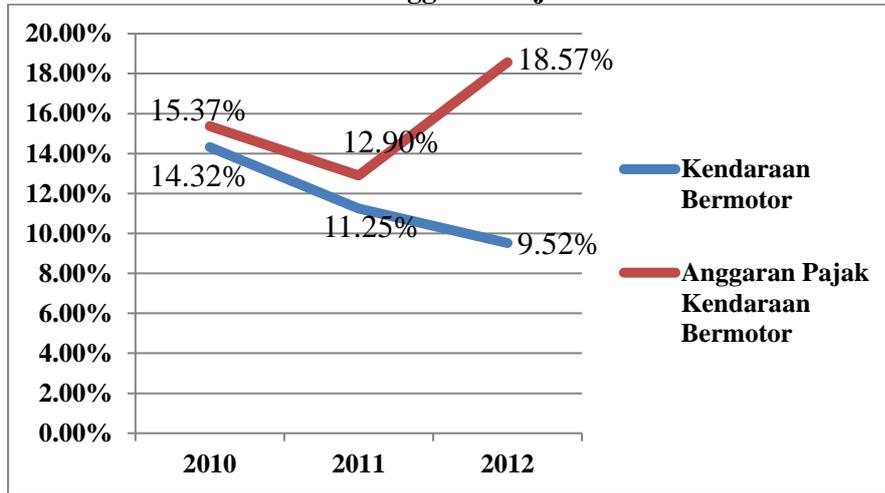


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pertambahan kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar 14,32% dan pertambahan anggaran pajaknya sebesar 15,37%. Tahun 2011, pertambahan anggaran menurun menjadi 12,90% namun dengan pertambahan kendaraan bermotor juga menurun menjadi 11,25%. Pada 2012 pertambahan kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 9,52% dan pertambahan anggaran pajaknya mengalami kenaikan menjadi 18,57%.

Gambar 4.3
Pertambahan Jumlah dan Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor

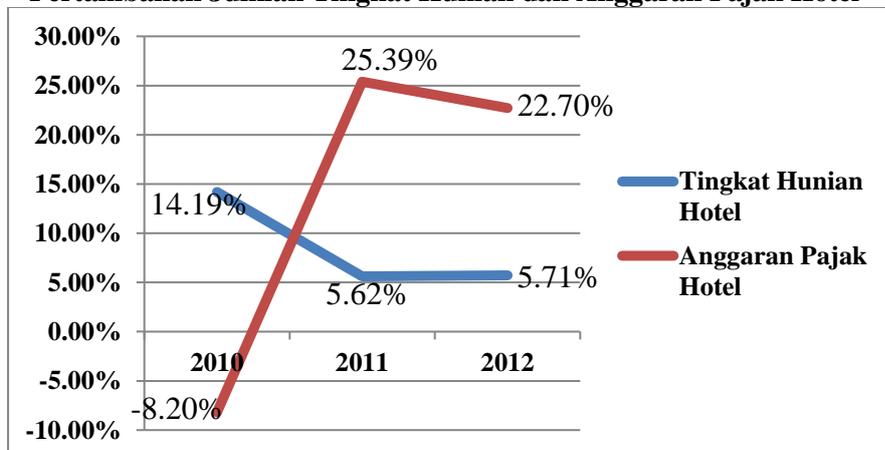


Sumber: Data diolah, 2014

Pertambahan tingkat hunian hotel tahun 2010 sebesar 14,19% dan pertambahan anggaran pajaknya negatif sebesar 8,20%. Pertambahan anggaran yang negatif disebabkan karena diturunkannya jumlah anggaran tahun 2010 karena tahun sebelumnya anggaran tersebut pada realisasinya tidak tercapai. Tahun 2011, pertambahan anggaran meningkat pesat menjadi 25,39% namun pertambahan tingkat hunian hotel menurun menjadi 5,62%. Pada 2012 pertambahan tingkat hunian hotel mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,71% dan pertambahan anggaran pajaknya turun menjadi 22,70%.

Perbandingan rata-rata pertambahan kendaraan bermotor dan tingkat hunian hotel dengan rata-rata pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor dan anggaran pajak hotel menunjukkan bahwa anggaran pajak telah memiliki persentase pertambahan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena perhitungan anggaran pajak ditetapkan dan dilihat dari beberapa aspek seperti jumlah kendaraan, jenis kendaraan, kepemilikan kendaraan, jenis hotel, fasilitas yang diberikan, maupun perbedaan dasar harga.

Gambar 4.4
Pertambahan Jumlah Tingkat Hunian dan Anggaran Pajak Hotel



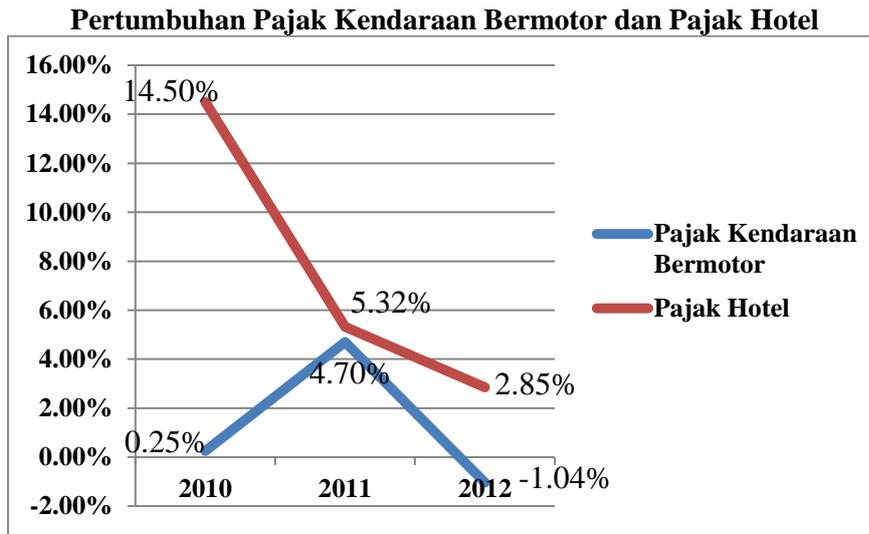
Sumber: Data diolah, 2014



Tahun 2010 dan tahun 2011 pajak kendaraan bermotor memiliki pertumbuhan yang positif dan meningkat dari sebesar 0,25% menjadi 4,70% serta termasuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2012 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor berubah menjadi tidak efektif dalam kriteria efektivitas, dengan tingkat pertumbuhan pajak yang turun menjadi negatif sebesar 1,04%. Penurunan di tahun 2012 disebabkan beberapa faktor yaitu lebih besarnya mutasi keluar kendaraan bermotor daripada mutasi masuk dan juga banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang Belum Daftar Uang (BDU) dengan jumlah potensi pokok pajak yang besar.

Tahun 2010 pajak hotel memiliki tingkat persentase pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 14,50% dengan skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2011 pajak hotel memiliki pertumbuhan yang positif dan termasuk dalam kriteria sangat efektif namun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 5,32%. Pada tahun 2012 tingkat pertumbuhan pajak hotel menurun lagi menjadi 2,85%, namun tetap termasuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas.

Gambar 4.5

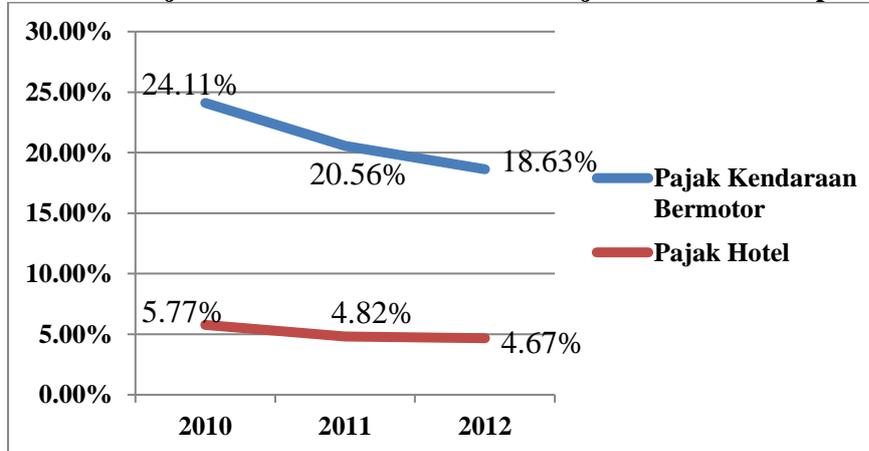


Sumber: Data diolah, 2014

Kontribusi pajak periode 2010-2012 di wilayah DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan baik dari pajak kendaraan bermotor maupun pajak hotel. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 24,11% tahun 2010 sedangkan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 5,77% terhadap pendapatan asli daerah. Tahun 2011 kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel turun menjadi 20,56% dan 4,82%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak kendaraan bermotor menurun lagi menjadi 18,63% dan kontribusi pajak hotel juga menurun menjadi 4,67%. Persentase kontribusi yang jumlahnya lebih besar dari 1% menandakan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel termasuk ke dalam golongan pajak yang sangat memberikan kontribusi dalam kriteria kontribusi.

Gambar 4.6

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel Terhadap PAD



Sumber: Data diolah, 2014



B. Pembahasan

Penerimaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari pendapatan asli daerah terus meningkat dalam periode 2010-2012, dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2010 sebesar Rp. 12.891.992.182.041,00 dan bertambah terus hingga menjadi sebesar Rp. 22.040.801.447.924,00 pada tahun 2012. Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur perekonomian dengan sektor tersier sebagai pemilik persentase tertinggi dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder setiap tahunnya dengan jumlah persentase lebih dari 70%. Sektor tersier antara lain meliputi subsektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan komunikasi, perbankan, dan jasa.

Pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel memiliki jumlah anggaran pajak yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2010-2012. Pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat pertumbuhan anggaran yang berfluktuatif namun lebih besar daripada tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan besaran tarif pajak bagi masing-masing jenis kendaraan dan pemilik kendaraan bermotor.

Tingkat pertumbuhan anggaran pajak hotel juga berfluktuatif dan lebih besar daripada tingkat pertumbuhan jumlah tingkat hunian hotel, kecuali pertumbuhan anggaran pajak hotel tahun 2010 yang mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya. Anggaran pajak hotel yang negatif pada tahun 2010 disebabkan karena rendahnya tingkat realisasi pajak hotel tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan anggaran pajak hotel yang lebih besar terjadi karena pada obyek pajaknya terdapat perbedaan harga dari fasilitas yang diberikan masing-masing hotel.

Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 1,30% dan rata-rata pertumbuhan pajak hotel sebesar 7,56%. Pajak kendaraan bermotor tahun 2012 memiliki tingkat pertumbuhan yang negatif dan tidak efektif dengan jumlah realisasi hanya sebesar Rp. 4.106.968.370.530,00 dari jumlah anggarannya yaitu Rp. 4.50.000.000.000,00. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang negatif disebabkan karena adanya mutasi kendaraan bermotor dan banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang untuk pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dinilai sangat memberikan kontribusi. Kriteria sangat berkontribusi diberikan bagi pendapatan pajak yang memiliki tingkat kontribusi lebih besar daripada 4%, dimana pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah melebihi kriteria yang ditentukan dengan persentase rata-rata sebesar 21,10% untuk pajak kendaraan bermotor dan 5,09% untuk pajak hotel.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas pos-pos dalam pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap kontribusi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase rata-rata sebesar 21,10%. Tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta positif pada tahun 2010 dan tahun 2011 dengan penapaian realisasi yang selalu melebihi anggaran, dan persentase negatif sebesar 1,04% pada tahun 2012, namun dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 1,30%.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase rata-rata sebesar 5,09%. Tingkat realisasi pajak hotel Provinsi DKI Jakarta menurun setiap tahunnya namun dengan persentase yang tetap positif dan selalu melebihi anggaran yang ditetapkan, dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 7,56%.
3. Pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan lebih besar daripada perhitungan pertambahan kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, dengan rata-rata pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor sebesar 15,61% dan rata-rata pertambahan kendaraan bermotor sebesar 11,70%.
4. Pertambahan anggaran pajak hotel cenderung ditetapkan lebih besar daripada perhitungan pertambahan tingkat hunian hotel di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2010 pertambahan anggaran pajak hotel memiliki persentase yang negatif. Rata-rata pertambahan anggaran pajak hotel sebesar 13,30% dan rata-rata pertambahan tingkat hunian hotel sebesar 8,51%.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi piutang yang besar.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola pajak daerah yang ada. Selain itu juga mencari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang baru agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan pajak daerah tertentu.
4. Pemerintah daerah diharapkan menambahkan lokasi pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.
5. Petugas yang terkait diharapkan mendapatkan pelatihan yang cukup serta meningkatkan kinerja pelayanan sehingga mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak membayar karena pelayanan yang kurang baik.
6. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data acuan yang bukan hanya berasal dari data sekunder (Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik), dan juga meneliti aspek pajak daerah yang lainnya selain pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.

UCAPAN TERIMA KASIH



1. Ibu Vivi Adeyani Tandean S.E., Ak., M.ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing, memberi saran, waktu, tenaga, masukan, diskusi, dan bantuan untuk penulis hingga selesainya skripsi ini.
Seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajar, mengayomi, dan memberikan ilmu pengetahuan yang tiada ternilai kepada penulis sejak semester awal sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu.
Kepada para staf perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah membantu penulis dalam mencari sumber-sumber penulisan untuk skripsi ini.
Bapak Hafid, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah yang telah memberikan persetujuan dan ijin atas riset yang dilakukan oleh peneliti.
Para staf bidang sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah yang telah bersedia membantu penulis dalam pengurusan surat riset dan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
Kedua Orangtua dan keluarga yang telah mendorong penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera menyelesaikan skripsi tepat waktu.
Teman-teman semua angkatan yang dalam suka dan duka di samping penulis dan dengan setia telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi semangat dan dukungan moral kepada penulis.
Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badan Pengelola Keuangan Daerah (2014), *Struktur Organisasi*, diakses 10 Juli 2014, <http://bpkd-jakarta.go.id/#>
- Badan Pusat Statistik (2012), *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012*, diakses 14 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2012/index.html>
- Badan Pusat Statistik (2013), *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013*, diakses 10 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2013/files/assets/basic-html/page36.html>
- Badan Pusat Statistik (2013), *Jakarta Dalam Angka / Jakarta in Figures 2013*, diakses 14 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/jda2013/files/assets/basic-html/page532.html>
- Bahagi (2010), *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 3
- Basayir, Fuad (1999), *Peran dan Strategi Keuangan di Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2006), *Metode Riset Bisnis: Volume 1*, Edisi 9, Jakarta: Media Global Edikasi
- Darwin (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Depdagri (2001), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah*
- Fauzan, Muhammad (2012), *Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
- Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Putu Wirawati (2013), *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 3
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Ketentuan Umum Pajak Daerah*
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang *Pajak Hotel*
- Praneka, Adelia Shabrina (2013), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
- Resmi, Siti (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus: Buku 1*, Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia (1997), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia (2000), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia (2007), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia (2009), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Sabon, Max Boli (2009), *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Siahaan, Mahot Pahala (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Watini, Sri (2010), *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.